

Call for Papers

südostasien 1/2020

<https://suedostasien.net/>

Perubahan Iklim: Sebab, Akibat, Gerakan Penentangan

Di Asia Tenggara dan di seluruh dunia lambat laun bangkit kesadaran baru mengenai dampak perubahan iklim: baru-baru ini jutaan orang melakukan protes melalui aksi global Pemogokan untuk Iklim bulan September 2019 - juga di Manila dan Jakarta – untuk menentang sikap pemerintahan dan pelaku ekonomi yang tidak melakukan tindakan. Kalangan ilmuwan dewasa ini sepakat, bahwa peningkatan masif gas rumah kaca yang disebabkan tindakan manusia sejak era industrialisasi adalah sebab utama pemanasan bumi. Dewan Iklim PBB menegaskan, masyarakat dunia harus menurunkan emisi CO₂ sampai tingkat nol netto hingga tahun 2050 guna meredam perubahan iklim. Namun logika konsumsi dan pertumbuhan kapitalistik, termasuk penyebaran bentuk-bentuk teknologi boros energi, terus memicu emisi CO₂. Meningkatnya mobilitas dan laju pertumbuhan penduduk dunia memperuncing situasi, terutama melalui peningkatan lalu lintas penerbangan.

Banyak perkembangan modern yang dilihat sebagai terobosan baru. Di samping kemudahan mobilitas, berbagai perangkat rumah tangga yang dilengkapi dengan teknologi terbaru dianggap sebagai indikator kenaikan kemakmuran di Asia Tenggara. Negara-negara seperti Indonesia mencatat angka pertumbuhan yang mengesankan. Namun neraca positif ini seringkali ditunjang oleh sektor-sektor ekonomi yang merusak iklim.

Penambangan batu bara, produksi semen, semua itu dengan cepat meningkatkan emisi zat-zat yang merusak iklim. Hutan dan lahan gambut, penyerap alami CO₂ yang terpenting, sejak bertahun-tahun dimusnahkan oleh perkebunan sawit dan industri-industri ekstraktif lainnya. Aktor-aktor lokal dan internasional mendukung sektor-sektor industri ini dengan berbagai alasan. Perusahaan asing sering terlibat, yang memproduksi barang-barang kebutuhan dunia Barat, dan sekaligus melayani kecenderungan konsumsi serupa di Asia Tenggara. Pembakaran hutan ilegal secara teratur menyebabkan kebakaran hutan yang tidak terkendali dalam skala luas. Asap kebakaran hutan menimbulkan lapisan Smog yang berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan ternak serta pada saat yang sama memperparah kondisi perubahan iklim.

Gambaran tingkat emisi CO₂ per kapita per tahun di Asia Tenggara menunjukkan situasi yang berbeda-beda: Brunei dengan 22,2 ton per kapita menduduki peringkat teratas sebagai negara yang paling boros, dan Laos dengan 0,3 ton per kapita sebagai negara yang paling "hemat". (*Data Bank Dunia 2014, <https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC>*). Namun di Asia Tenggara terdapat paling banyak "lokasi krisis" perubahan iklim, sebagai dampak dari eksploitasi sumber daya alam yang dengan karakteristik kolonial maupun neokolonial. Indonesia tercatat sebagai pendorong perubahan iklim terbesar di Asia Tenggara dengan emisi tinggi dari pembakaran hutan dan lahan gambut.

Pada saat yang sama, negara-negara Asia Tenggara harus menanggung dampak buruk perubahan iklim, seperti banjir besar akibat badai tropis dan naiknya permukaan laut. Situasi itu secara langsung berdampak besar pada kehidupan masyarakatnya. Misalnya di Jakarta yang sekarang terancam tenggelam. Dalam jangka menengah akan terjadi lebih banyak lagi fenomena cuaca ekstrem serta kelangkaan pangan dan air bersih. Juga keragaman hayati di laut dan darat terancam oleh naiknya suhu udara.

Di banyak negara Asia Tenggara sudah ditetapkan berbagai kebijakan menghadapi perubahan iklim. Sayangnya, penerapan kebijakan-kebijakan ini sering terhambat oleh praktek korupsi dan kepentingan elit ekonomi, yang sering terkait erat dengan politik. Kerjasama ekonomi transnasional pun sering didasarkan pada kepentingan eksploitasi sumber daya alam. Di pihak lain, terutama perusahaan-perusahaan Barat, yang menghadapi tekanan publik di negaranya, banyak yang sudah menetapkan standar-standar ketat bagi perusahaan pemasok dalam upaya meminimalisasi dampak-dampak ekologis. Namun perusahaan-perusahaan asing ini juga bekerja dengan logika pertumbuhan kapitalistik. Karena itu, para aktivis di Asia Tenggara sering menyebut kebijakan ini sebagai "Greenwashing".

Pendekatan baru, yang mempertanyakan model ekonomi pertumbuhan tanpa batas, biasanya hanya datang dari kelompok-kelompok non-pemerintah. Para aktivis tidak hanya mengkritik sikap konsumsi secara individual, melainkan juga mempertanyakan eksploitasi sumber daya alam tanpa batas. Mereka juga mengembangkan gagasan-gagasan model ekonomi baru, seperti pembentukan koperasi, lalu mendiskusikan dan menerapkannya di tingkat lokal. Di bidang kerjasama pembangunan sekarang sudah ada banyak proyek yang menjanjikan, yang didukung oleh kelompok-kelompok non-pemerintah dengan menggali kembali pengetahuan lokal. Misalnya dengan menerapkan metode-metode pertanian alternatif untuk meredam perubahan iklim dan melakukan terobosan-terobosan dalam upaya mengantisipasi iklim yang berubah-ubah.

Sekalipun kelompok termiskin yang biasanya paling merasakan dampak perubahan iklim, diskusi dan kegiatan terkait dampak perubahan iklim di Asia Tenggara biasanya menjadi wacana kaum elit. Pendekatan-pendekatan kerjasama pembangunan sering dituduh sebagai "terbelakang", kemungkinan juga karena keterlibatan kelompok "elit". Ada baiknya diteliti lebih dalam lagi, apa sebenarnya penyebab diskrepansi ini. Misalnya soal akses terhadap pendidikan lebih tinggi, yang memungkinkan warga mendapat pengetahuan tentang perubahan iklim yang disebabkan manusia, dan memberi mereka kemampuan mempertanyakan secara kritis apa penyebabnya.

Inilah antara lain permasalahan yang akan dibahas:

- Di mana saja bisa terlihat dampak paling drastis dari perubahan iklim yang disebabkan manusia di kawasan Asia Tenggara?
- Bagaimana para pelaku di Asia Tenggara memandang hubungan timbal balik antara kepentingan ekonomi dan dampak negatif perubahan iklim pada sektor-sektor industri yang relevan (misalnya batubara dan semen) ?

- Apa dampak pertanian, peternakan, perkebunan untuk pakan ternak, produksi minyak sawit untuk bahan bakar, pada perubahan iklim? Apa peran para petani kecil dan perusahaan-perusahaan besar?
- Apa saja kebijakan politik di negara-negara Asia Tenggara sehubungan dengan perubahan iklim, termasuk kebijakan transnasionalnya?
- Argumen apa dan bentuk-bentuk aksi apa saja yang digunakan kelompok-kelompok lokal menghadapi perubahan iklim, dan di mana saja terbentuk jaringan transnasional maupun jaringan global?
- Sejauh mana kritik terhadap kapitalisme memainkan peran dalam wacana gerakan perlindungan iklim di Asia Tenggara?
- Di mana ada proses-proses penyesuaian diri di tingkat lokal terhadap perubahan iklim? Bagaimana proses ini bisa berlangsung secara efektif?
- Terobosan apa saja yang ada, misalnya yang mengarah pada pertanian "climate smart" atau di bidang energi terbarukan, apakah ada proyek-proyek kerjasama pembangunan dan bagaimana intervensi semacam ini dipandang oleh aktor-aktor lokal?
- Bagaimana tema mobilitas, terutama sektor penerbangan yang bertumbuh cepat, didiskusikan dalam debat-debat tentang perubahan iklim di Asia Tenggara, dan apa saja gagasan serta konsep-konsep yang muncul untuk transformasi sektor perhubungan ?
- Apa saja konsep-konsep dan pengalaman konkret yang ada tentang renaturisasi (misalnya lahan gambut) dan apa saja peran pengetahuan lokal serta pertukaran internasional (kerjasama ilmiah, Dekade Pemulihan Sistem Ekologi PBB)

Kami ingin membahas permasalahan di atas dalam berbagai bentuk: reportase, latar belakang, analisa, profil para aktor, wawancara, esei foto, resensi buku/film/musik sesuai tema. Kami tunggu usulan dan gagasan kalian!

Deadline untuk artikel (maksimum 10.000 karakter) adalah 6 Januari 2020 (dalam kasus-kasus individual dan setelah berkonsultasi dengan para editor, deadline bisa dibicarakan). Harap kirimkan abstrak singkat (maks 1.000 karakter) ke pada editor sampai 20 November 2019.

Silakan kirim foto yang cocok dan berkualitas baik untuk artikel (lebar minimal 1000 px, setidaknya 300 dpi). Pertanyaan hak cipta harus diklarifikasi terlebih dahulu.

Kontak redaksi:

Sophia Hornbacher-Schönleber: smh93@cam.ac.uk

Anett Keller: soa_mag@asienhaus.de

Tanja Matheis: t.matheis@uni-kassel.de

Hendra Pasuhuk: hendra.pasuhuk@dw.com

Anke Timmann: anke.timmann@outlook.de

Janis Wicke janis.wicke@posteo.de

Marlene Weck: soa_rezensionen@asienhaus.de (resensi buku/film)